

Provinsi Jawa Tengah tersusun atas 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang dimana terdapat 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah sekaligus dinobatkan sebagai kabupaten yang memiliki luas wilayah nomor satu di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap tercatat memiliki luas wilayah hingga 213.851 hektar. Kota yang memiliki luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah ialah Kota Magelang dengan luas wilayah hanya 1.812 hektar.

2.1.2 Kondisi Topografi

Secara topografi, Jawa Tengah memiliki keragaman yakni terdiri atas daerah pegunungan dan dataran tinggi di sisi tengah, daratan rendah yang mendominasi Jawa Tengah, serta pantai di sisi utara dan juga selatan. Dengan keragaman ini tentu tanah di Jawa Tengah memiliki kemiringan yang bermacam-macam. Kemiringan tersebut akan menjadi landasan dalam mempertimbangkan pemanfaatan serta fungsi guna lahan. Sehingga penguraian topografi dari Provinsi Jawa Tengah seperti berikut ini :

- Ketinggian antara 0-100 m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang pantai utara dan selatan seluas 53,3%,
- Ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4%,
- Ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut seluas 14,7%,
- Ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut seluas 4,6%.

2.1.3 Kondisi Demografi

Pada tahun 2012 tercatat bahwa Jawa Tengah dihuni 33.270.207 jiwa yang dimana jumlah ini berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010, yang dimana penduduk di Jawa Tengah dirincikan menjadi laki-laki sebanyak 16.495.705 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 16.774.502 jiwa (50,42%), dengan sex ratio sebesar 98,34%. Di Jawa Tengah juga dihuni sejumlah 8.913.425 berdasarkan data pada tahun 2011, dengan rerata anggota rumah tangga sebesar 3,7 jiwa. Apabila ditinjau melalui persebaran penduduk per kabupaten/kota, diketahui bahwa Kabupaten Brebes dihuni sebanyak 1.770.480 jiwa yang disusul oleh Cilacap 1.679.864 jiwa, dan Kota Semarang 1.629.924 jiwa.

2.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Sejarah Singkat Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ialah sebuah organisasi yang didirikan oleh pemerintah untuk mengurus sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi dimana organisasi ini dikepalai oleh seorang kepala dinas yang bertanggungjawabkan jabatannya kepada Gubernur dengan melalui perantara Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terletak di Jl. Pahlawan No.16 Semarang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang dimana pembentukannya dilandaskan pada Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 dan Peraturan

Daerah No. 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri atas tiga instansi pemerintahan yang digabungkan menjadi satu, yakni :

1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Dati I Jawa Tengah
2. Kanwil Departemen Tenaga Kerja Jawa Tengah
3. Kanwil Departemen Transmigrasi Jawa Tengah
4. Alih Tugas dan Biro Pemerintahan Setda Prov. Jawa Tengah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada 13 Juni 2008- 31 Desember 2016

Penggabungan ketiga instansi tersebut sesuai dengan PP No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah.

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

- a. Visi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Visi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan gambaran organisasi yang ingin diwujudkan dimasa depan yaitu : “Terwujudnya Nakertrans Berdaya Saing, Harmnis, Selamat, Sejahtera”

- b. Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
2. Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja;
3. Meningkatkan Kualitas Penempatan Transmigrasi;
4. Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja;

6. Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Nakertrans.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Jawa Tengah

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah diuraikan berlandaskan pada Gubernur Jawa tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, yang dimana susunannya menjadi berikut ini :

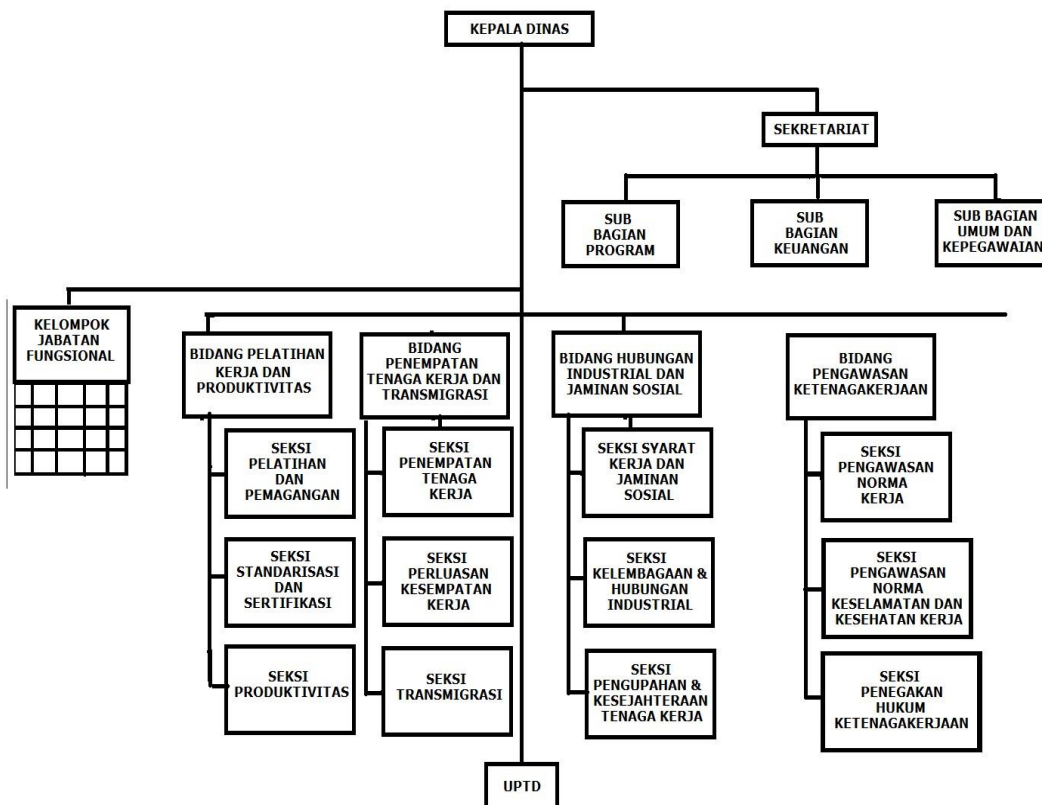
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Subbag Program
 - Subbag Keuangan
 - Subbag Umum dan kepegawaian
3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
 - Seksi Pelatihan dan Pemagangan
 - Seksi Standarisasi dan Sertifikasi
 - Seksi Produktivitas
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
 - Seksi Transmigrasi
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
 - Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial

- Seksi Kelembagaan dan Hubungan Industrial
 - Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
- Seksi Pengawasan Norma Kerja
 - Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA
TENGAH



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Saat menyelenggarakan tugasnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretariat dengan membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dengan 4 (empat) orang Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Tugas dan fungsi dalam struktur organisasi pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas ialah komponen yang melaksanakan otonomi daerah yang dimana kepemimpinannya diserahkan kepada seorang Kepala Dinas, yang kemudian kepala dinas akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Gubernur melalui perantara Sekretaris Daerah. Tugas yang dilimpahkan kepada kepala dinas ialah menjalankan urusan di dalam sektor ketenagakerjaan serta transmigrasi yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2. Sekretaris

- a. Tugas :

Tugas utama yang dibebankan kepada sekretaris ialah melakukan pengkoordinasian tugas yang tengah dilaksanakan, membina dan mendukung administrasi semua unit yang tergabung di dalam organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi :

- Menyiapkan bahan yang sekiranya dibutuhkan dalam mengkoordinasikan kegiatan yang telah direncanakan.
- Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam kepentingan pengkoordinasian dan kepentingan dalam merumuskan rencana program beserta kegiatannya.
- Menyiapkan bahan yang sekiranya dibutuhkan guna kepentingan pembina dan mendukung administrasi yang dimana terdiri atas ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
- Menyiapkan bahan yang sekiranya digunakan untuk kepentingan pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- Menyiapkan bahan yang sekiranya dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan koordinasi dalam menjalankan sistem yang mengendalikan intern pemerintah dan mengelola informasi beserta mendokumentasikannya.
- Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam mengelola kekayaan yang dimiliki oleh daerah serta melayani kepentingan penyediaan barang/jasa
- Menyiapkan bahan untuk melangsungkan pengevaluasian dan melaporkannya sesuai dengan lingkup tugasnya.

- Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Kepala Sub Bagian Program

Tugas yang dilimpahkan kepada Kepala Sub Bagian Program yakni :

- Menyusun bahan yang sekiranya dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan teknis dalam sektor program.
- Menyusun bahan yang sekiranya dibutuhkan dalam mengkoordinasikan dalam merencanakan program beserta kegiatan di dalam ruang lingkup dinas.
- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam mengendalikan program dan kegiatan yang berada di dalam ruang lingkup dinas.
- Menyusun bahan yang sekiranya dibutuhkan dalam mengelola data dan informasi yang termasuk ke dalam sektor program.
- Menyusun bahan yang akan diperlukan dalam melakukan pengevaluasian serta menyusun laporan di dalam ruang lingkup dinas.
- Menyelesaikan beberapa tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh pemimpin.

- Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas yang dilimpahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan yakni :

- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam merumuskan kebijakan teknis di dalam sektor keuangan.
- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam mengkoordinasikan aktivitas pengkajian teknis di sektor keuangan.

- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam mengelola keuangan dalam ruang lingkup dinas.
 - Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dan menjalankan aktivitas mengelola data beserta informasi terkait sektor keuangan.
 - Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dan mengevaluasi serta melaporkannya yang termasuk ke dalam ruang lingkup sektor keuangan.
 - Menunaikan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh pemimpin
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas yang diamanahkan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yakni :

- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam merumuskan kebijakan teknis pada sektro umum dan kepegawaian
- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam mengkoordinasikan aktivitas pengkaian secara teknis di dalam ruang lingkup sektor umum dan kepegawaian
- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan mengelola ketatausahaan
- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam mengelola kepegawaian
- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam mengelola rumah tangga dan aset
- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam menjalin kerjasama dan kehumasan

- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam mengelola kearsipan dan dokumentasi
- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam melaksanakan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan
- Menyusun bahan yang sekiranya diperlukan dalam mengevaluasi dan menyusun laporan.
- Menunaikan tugas yang berkaitan dengan kedinasan lainnya yang dimana dilimpahkan oleh peimpin
- Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
 - a. Tugas : membuat rumusan, perencanaan, melakukan pengevaluasian, dan menunaikan sejumlah tugas terkait sektor pelatihan kerja dan produktivitas
 - b. Fungsi :
 - Mempersiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan segala hal terkait sektor pelatihan dan pemagangan
 - Mempersiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan segala hal terkait sektor standarisasi dan sertifikasi
 - Mempersiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan segala hal terkait sektor produktivitas
 - Menunikan tugas kedinasan lainnya yang diamanatkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a. Tugas : membuat sebuah rumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan menjalankan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkannya terkait sektor Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri atas penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi.
 - b. Fungsi :
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakna, mengevaluasi dan melaporkan terkait sektor penempatan tenaga kerja
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakna, mengevaluasi dan melaporkan terkait sektor perluasan kesempatan kerja
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakna, mengevaluasi dan melaporkan terkait sektor transmigrasi
 - Menjalankan tugas kedinasan lainnya yang diamanatkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
 - a. Tugas : merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi kebijakan serta membuat sebuah laporan terkait pengimplementasian kebijakan dalam sektor Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
 - b. Fungsi :

- Memersiapkan rumusan atas kebijakan, mengkoordinasi dan menjalankan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di dalam sektor syarat kerja dan jaminan sosial
 - Memersiapkan rumusan atas kebijakan, mengkoordinasi dan menjalankan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di dalam sektor kelembagaan dan hubungan industrial
 - Memersiapkan rumusan atas kebijakan, mengkoordinasi dan menjalankan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di dalam sektor pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja
 - Menjalankan tugas kedinasan lainnya yang diamanatkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bidang pengawasan Ketenagakerjaan
 - a. Tugas : menyusun rumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mengevaluasi kebijakan, dan membuat laporan atas pelaksanaan kebijakan di dalam sektor pengawasan ketenagakerjaan.
 - b. Fungsi :
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di dalam sektor norma kerja
 - Menyiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di dalam sektor pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja

- Menyiapkan rumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di dalam sektor penegakan hukum ketenagakerjaan
 - Menjalankan tugas kedinasan lainnya yang diamanatkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- UPT

Unit Pelaksana Teknis ialah komponen yang akan melaksanakan teknis dinas yang dimana dikepalai oleh seorang kepala UPT yang memiliki kedudukan di bawah dan mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada Kepala Dinas. UPT memiliki tugas untuk menjalankan sebagian tugas kedinasan yang terdapat di suatu daerah tertentu.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas untuk menjalankan sejumlah tugas yang diamanatkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kecakapan serta kebutuhan yang dimana kelompok ini tersusun atas beberapa tenaga fungsional yang sudah diatur dan ditetapkan dengan dilandaskan pada peraturan perundang-undangan serta banyaknya tenaga fungsional ini disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerjanya.

2.3 Bursa Kerja Online (E-Makaryo)

Bursa Kerja Online (BKO) ialah bursa kerja yang sistem pelayanannya dapat diakses secara online dengan terhubung melalui jaringan internet. Pada bursa kerja online ini, seluruh informasi yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan akan tercantum yang dimana lowongan pekerjaan tersebut dapat terdapat di semua

tempat, tidak hanya dalam ruang lingkup regional ataupun nasional. Bursa Kerja Online (BKO) ini ialah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan memberikan sejumlah informasi terkait lowongan pekerjaan yang saat ini tengah tersedia secara cepat dan mudah dalam pengaksesannya serta semua orang dapat mengakses informasi ini kapan saja dan dimana saja. Pengaksesan Bursa Kerja Online E-Makaryo dapat dilakukan dengan menggunakan tautan : <https://www.bursakerja.Jawa Tengahprov.go.id/> dengan menggunakan perangkat komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet.

Awalnya bursa kerja ini dinamai sebagai Bursa Kerja Jawa Tengah pada tahun 2005. Secara pelayanan, Bursa Kerja Jawa Tengah bekerja dengan baik, akan tetapi terdapat sejumlah kekurangan. Hingga pada 2019 munculan inovasi E-Makaryo dimana terdapat pembenahan yang menyebabkan seluruh jejaring kerja sama dapat ditempatkan dengan lebih baik. Di dalam E-Makaryo juga terdapat tambahan layanan, yaitu konsultasi, video pembelajaran dan job matching. E-Makaryo tidak hanya memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, terdapat juga informasi untuk mencari tempat magang dan pelatihan. Aplikasi ini bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja serta sudah terintegrasi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) se-Jawa Tengah. Semua layanan sistem antar kerja sudah terfasilitasi pada aplikasi E-Makaryo sehingga pencari kerja dapat memonitoring langsung status lamarannya dan pemberi kerja juga dapat menyaring tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Dengan adanya E-Makaryo, masyarakat dipermudah dalam memperoleh informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia yakni dengan mengakses laman <https://www.bursakerja.JawaTengahprov.go.id/> yang dilanjutkan dengan memilih Daftar Pencari Kerja guna mencantumkan informasi serta data diri masyarakat yang berkepentingan untuk mencari pekerjaan sehingga sejumlah fitur yang tersedia di laman web tersebut dapat diakses. Dalam melayani masyarakat, E-Makaryo membutuhkan sejumlah tenaga ahli dalam mencukupi seluruh kualifikasi dan peralatan, yang rinciannya di bawah ini :

Tabel 2.1
Tenaga Ahli E-Makaryo

NO	URAIAN	KEBUTUHAN
		SPESIFIKASI
A.	Tim Teknis	
	• Team Leader	S2-Teknik Informatika
	• Ahli Analis dan Perancangan Sistem	S1-Teknik/Sistem Informasi
	• Ahli Database	S1-Teknik Informatika
	• Ahli Programmer	S1- Teknik Informatika
	• Super Admin	S1-Ilmu Pemerintahan
	• Admin	S1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam E-Makaryo yang pertama adalah tim teknis yang terdiri dari Tim Leader berpendidikan minimal S2 Teknik Informatika, Ahli Analis dan perancangan minimal pendidikan S1 Teknik/Sistem Informasi, Ahli Database minimal pendidikan S1 Teknik

Informatika, Ahli Programmer minimal pendidikan S1 Teknik Informatika, Super Admin minimal pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan dan Admin minimal pendidikan S1.

Tabel 2.2
Penngunjung E-Makaryo Bulan Januari-Maret 2021

Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	69.765
Februari	100.832
Maret	210.940

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.2 menunjukkan data pengunjung E-Makaryo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah setiap bulan mengalami kenaikan. Terlihat dari bulan Januari sebanyak 69.765 orang mengunjungi E-Makaryo. Februari sebanyak 100.832 orang yang mengunjungi E-Makaryo dan Bulan Maret pengunjung E-Makaryo mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 210.940 orang.